

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah menginspirasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai Undang-undang tersebut, jika sebelumnya Manajemen Pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top-down* atau sentralistik kemudian berubah dengan paradigma baru *bottom-up* atau desentralistik.

Paradigma baru sebagai realisasi dalam gerakan peningkatan mutu pendidikan tersebut lebih terfokus dengan lahirnya konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/MBM). Hal ini sesuai UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 52 ayat 1 "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah."

Sebagai paradigma baru, MBS/MBM merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi secara luas kepada madrasah serta pelibatan masyarakat setempat.

Dengan otonomi, Madrasah lebih leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikan sesuai prioritas kebutuhan dan tanggap terhadap lingkungan setempat, meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Dengan MBM. Madrasah memiliki *full authority and responsibility* dalam menetapkan program-program pendidikan serta berbagai kebijakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan.

Salah satu implementasi otonomi daerah dan MBS/MBM adalah lahirnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai *political will* pemerintah pada berbagai lapisan. Dengan KTSP setiap sekolah dapat merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum sesuai visi, misi, tujuan dan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. KTSP memberi peluang pada setiap lembaga pendidikan untuk mengenyam otonomi seluas-luasnya. Kurikulum adalah seluruh usaha sekolah untuk mempengaruhi siswa belajar baik di dalam maupun di luar kelas atau bahkan di luar sekolah (Sanjaya, 2008 : 4) jadi, kurikulum tidak hanya menyangkut mata pelajaran.

Otonomi (swakelola), berarti kewenangan dan kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri secara independen menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah. (Syaiful, 2004 : 137)

Otonomi daerah, MBS dan *autoritas* secara luas pada sekolah dalam merencanakan kurikulum memungkinkan setiap sekolah atau madrasah tampil dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Setiap sekolah boleh menunjukkan power dan kesungguhannya mengembangkan kurikulum dan menawarkannya kepada masyarakat.

Pemahaman dan dukungan masyarakat sudah seharusnya menjadi target prioritas suatu Sekolah/Madrasah karena sekolah tak mungkin berdiri kokoh tanpa dukungan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ-11/409/2003 tentang Pembentukan Komite Madrasah yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah sesuai tujuan Pendidikan yang ditetapkan, serta tuntutan pembangunan dewasa ini, perlu adanya peningkatan dukungan dan peran serta masyarakat secara lebih optimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Mulyasa, 2005: 106)

Penerapan otonomi daerah yang meluas pada otonomi Sekolah/Madrasah kemudian disusul kebijakan lahirnya MBS dan KTSP berdampak secara riil pada perubahan sekolah. Perbedaan antar sekolah terlihat menyolok. Ada sekolah yang hidup sejak pagi sampai sore, sementara ada yang hidup setengah hari saja. Perbedaan tersebut tentu saja berpengaruh terhadap terbentuknya opini dan animo masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat perbedaan-perbedaan tersebut? Bukankah standar isi Sekolah tingkat Dasar sama?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dipelajari pengembangan kurikulum setiap Sekolah/Madrasah. Pada prakteknya, ada sekolah yang hanya *intens* dengan Standar Isi, ada yang memperhatikan dan melaksanakan kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler serta kegiatan pengembangan diri yang terintegrasi dengan kegiatan kurikulumnya secara dinamis dan kreatif.

Salah satu kegiatan riil yang dapat menarik simpati masyarakat pada Sekolah/Madrasah adalah kegiatan Ekstrakurikuler. Pada masyarakat yang meyoritas Islam, kegiatan ekstrakurikuler yang mereka butuhkan, tentu saja yang bernuansa islam. Hal ini sesuai dengan waktu kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya dilaksanakan sore hari dan menyita waktu pendidikan keluarga. Sementara realita tuntutan kehidupan ekonomi dan sosial menyebabkan tidak sedikit orang tua kehilangan waktu melaksanakan pendidikan anak dalam keluarga.

Dewasa ini masyarakat mengalami perubahan yang sangat mendalam. Seluruh sendi kehidupan, tata nilai, pola relasi, ekonomi, teknologi, jenis dan cara kerja baru. Tindakan pendidikan yang tampak sederhana di masa lalu, sekarang penuh dengan tantangan. Perubahan kehidupan masyarakat jelas menuntut pembaharuan pendidikan, termasuk pengelolaan kurikulum(Triyono,2007:80)

Salah satu bentuk riil pembaharuan bidang kurikulum adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan, menurut Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, disebutkan bahwa pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Sesuai dengan UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 1 dinyatakan bahwa pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan terdapat pada satuan pendidikan. (Sagala, 2004 : 3).

Kemampuan mengembangkan kurikulum setiap personal pada lembaga atau antar lembaga pendidikan tentu berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan kebijakan antar lembaga pendidikan pun berbeda, dan masyarakat sebagai konsumen atau *input* dari proses pendidikan mampu menangkap perbedaan tersebut sebagai suatu yang harus dipertimbangkan jika akan memberikan sebuah dukungan.

Lembaga pendidikan yang tanggap terhadap dinamika kehidupan dan memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum tersebut setidaknya jeli membaca tantangan yang sebenarnya merupakan peluang bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan perannya dalam berbagai problema sosial. Salah satu dinamika sosial saat ini adalah mulai lunturnya pendidikan dalam keluarga akibat tuntutan ekonomi yang memacu setiap orang tua untuk lebih aktif beraktifitas di luar keluarga. Arus emansipasi juga tak

ketinggalan menjauhkan calon generasi bangsa untuk mengenyam pendidikan dalam keluarga. Orang tua menghendaki anaknya terdidik seoptimal mungkin, terhindar dari berbagai dampak negatif arus global, membutuhkan pengelola dan pengawasan terhadap anak yang dapat dipercaya atau kooperatif.

Kenyataan tersebut sungguh menantang para pengelola dan pengembang pendidikan. Selain memperhatikan peluang otonomi MBS/MBM, dan KTSP, hendaknya berpegang teguh pada hal-hal fundamental dari pendidikan, antara lain pendidikan berlangsung sepanjang zaman (*Life Long Education*) menurut jenjang-jenjang tertentu secara linier, dimulai dari jenjang pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan berlangsung terus menerus di berbagai jenis kegiatan dan pekerjaan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan berlangsung di setiap kegiatan sosial politik, hukum, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan (Suparlan , 2008). Pernyataan tersebut sesuai dengan pedoman umat Islam yang tertulis sejak berabad-abad silam yaitu “ *Tholabul ‘Ilmi Minal Mahdi illal Lahdi* ”.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, sebuah institusi pendidikan yang dinamis dan kreatif tentu mampu menangkap perubahan sosial masyarakat dan selanjutnya mengadopsi sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Dengan landasan pendidikan sepanjang hayat, maka memperpanjang waktu belajar anak di sekolah, misalnya dengan aneka kegiatan kurikulum serta ekstrakurikuler setidaknya menjadi jawaban atas

perubahan kehidupan masyarakat. Salah satu kegiatan yang pada dasarnya menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam adalah kegiatan yang bernuansa Islam. Kurikulum adalah seluruh usaha sekolah untuk mempengaruhi siswa belajar baik di dalam maupun di luar kelas atau bahkan di luar sekolah (Sanjaya, 2008 : 4) jadi, kurikulum tidak hanya menyangkut mata pelajaran. Salah satu bagian dari kurikulum yang diharapkan mampu memberi manfaat bagi peningkatan mutu siswa adalah kegiatan ekstrakurikuler. Bagi masyarakat yang mayoritas Islam, maka kegiatan yang dibutuhkan adalah yang bernuansa Islami.

Kegiatan Ekstrakurikuler Islami adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Madrasah berupa kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler sebagai ciri khas Madrasah, misalnya kegiatan kesenian, sosial agama , Pramuka, UKS dan lain-lain. (Depag, 1995 : 23) Islami adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengamalan nilai-nilai ke-Islaman.

Dari uraian tersebut, penulis mengambil judul, “Pengembangan Ekstrakurikuler Berbasis Islam Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Ketintang Nogosari Boyolali”.

B. Rumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah ” Pengembangan Ekstrakurikuler Berbasis Islami Pada Madrasah Ibtidaiyah ”. Dari masalah tersebut maka peneliti menjabarkannya menjadi tiga sub masalah yaitu :

1. Bagaimana karakteristik pengembangan Kurikulum pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ketitang Nogosari Boyolali ?
2. Bagaimana karakteristik pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pada MIN Ketitang Nogosari Boyolali ?
3. Bagaimana karakteristik kegiatan ekstrakurikuler berbasis Islami ?

C. Tujuan Penelitian

1 . Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan dan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler berbasis Islami pada MIN Ketitang Nogosari Boyolali.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan pengembangan Kurikulum MIN Ketitang Nogosari.
- b. Mendeskripsikan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pada MIN Ketitang Nogosari Boyolali.
- c. Mendeskripsikan karakteristik kegiatan ekstrakurikuler berbasis Islami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis dalam wahana pengetahuan tentang pengembangan kegiatan ekstrakurikuler umumnya dan yang berbasis Islami pada khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepala Madrasah beserta *steakholder* setempat, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan strategis dalam pengembangan kurikulumnya pada masa yang akan datang.
- b. Bagi pengembang kurikulum satuan pendidikan, khususnya pendidikan yang berlatar belakang masyarakat Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebaga pertimbangan atau gambaran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulumnya .
- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mendalami pengembangan kegiatan ekstrakurukuler, khususnya yang berbasis Islami.

